e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi April 2023

# Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

**Ni Komang Ayu Sindi Junika Sari[(1)]**
**Putu Nuniek Hutnaleontina [(2)]**
[(1)(2)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
*e-mail: sindijunika8@gmail.com*

***ABSTRACT***

*This study aims to assess the effectiveness of implementation of the village financial system "Siskeudes". Managing village finances in Tusan Village, Banjarangkan District, Klungkung Province, using five indicators as measures of Siskeudes effectiveness, including planning, implementation, management, reporting, and accountability. Methods used this study is a qualitative method. Data for this study were collected through interviews, observations, and documentation techniques. As a result of the analysis, 1) introduction of Siskeudes in Tusan village was not effective and not optimal in terms of introduction. This is because Tusan Village has not fully implemented the system and is balancing between handwritten manual reports and Microsoft Excel. 2) The implementation of Siskudes in Tusan village has the problem that not all personnel involved have the same competence and understanding of the operation of system. 3) The low planning capacity of Tusan Village meant that the reporting results of information on implementation of activities carried out by the village were not sufficiently reported due to the lack of planning. 4) The phase of entering financial reports is not ideal. At this stage, Tusan village government still running the reporting phase in manual format, which could lead to financial reporting manipulation and budget abuse.*
***Keywords****: Effectiveness, Village Financial System*

## PENDAHULUAN

Desa adalah hasil dari fenomena geografis, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di suatu wilayah dan berinteraksi dengan wilayah lain. Desa pada umumnya merupakan bagian dari unit organisasi pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan pemerintah kota. Desa memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan mengendalikan pemerintahan dan berbagai kepentingan masyarakat. Tata kelola desa yang baik adalah kepemimpinan tata kelola desa yang menghargai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian, serta mengikuti aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kesempatan yang sangat baik untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini seharusnya berdampak positif bagi pemerintahan desa dan keuangan desa, karena pemerintahan desa yang baik memungkinkan penggunaan dana yang efisien.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan

pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa disebut siskeudes untuk meningkatkan kualitas administrasi keuangan kota. Penggunaan aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa. Penerapan aplikasi Siskeudes menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes berpengaruh cukup baik terhadap efisiensi waktu.

Selain itu, dikatakan bahwa beberapa kantor desa belum benar-benar menerapkan sistem keuangan desa. Dimana proses pengelolaan keuangan dan APBDesa tetap diimbangi dengan pelaporan keuangan tulisan tangan. Berdasarkan hasil investigasi awal, Desa Tusan tetap menggunakan laporan tulisan tangan dan *Microsoft Excel* untuk pelaporan keuangan dalam pelaporan keuangannya, meskipun aplikasi siskeudes sudah diterapkan di Desa Tusan.

Laporan keuangan yang masih manual tentunya dapat diedit atau diubah sewaktu-waktu, selain itu moral individu SDM yang terlibat rendah, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran lebih besar. Peristiwa yang terjadi di kantor kepala Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Wilayah Administratif Klungkung ini terkait laporan warga Tusan yang melaporkan penyalahgunaan anggaran desa yang tidak jelas tujuannya sehingga mengakibatkan yang mengakibatkan perangkat Desa Tusan belum menerima haknya, serta sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan desa belum bisa terlaksana.

Fenomena yang terjadi di Desa Tusan sangat erat kaitannya dengan penerapan sistem keuangan desa, karena dalam hal ini jika ada tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem keuangan desa yang optimal maka Desa Tusan dapat mengelola keuangan desa dengan baik. . sesuai prosedur siskeudes. Karena semakin tinggi persentase keberhasilan mewujudkan tujuan anggaran kota yang sedang berjalan, maka dianggap semakin efektif pelaksanaan sistem keuangan kota tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan efektifitas pelaksanaan sistem keuangan desa akan membawa konsekuensi bagi masyarakat desa yang harus sejahtera sejak adanya perbaikan pelaksanaan sistem keuangan desa, khususnya mengenai pembangunan ekonomi masyarakat desa. Suatu sistem keuangan (Siskeudes) dapat mendorong perekonomian desa, dimana proses pengelolaan anggaran desa dapat membawa manfaat bagi masyarakat desa, dimana anggaran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk infrastruktur ekonomi, prasarana perekonomian meliputi berbagai jenis bantuan serta kelancaran program yang menyangkut kepentingan desa dan masyarakat.

Penelitian ini dilatar belakangi pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Mardaw, dkk (2022), penelitian didukung oleh Hijratul

Aeni M, dkk (2022), Rahmi Hayati (2021), Gayatri, Made Yeni latriani (2018) yang memperoleh kesimpulan bahwa penerapan siskeudes sudah bisa dikatakan efektif, hal ini dapat diukur dari keberhasilan program yakni keberhasilan penerapan Aplikasi Siskeudes, kemudian keberhasilan sasaran dan kepuasan penerapan Aplikasi Siskeudes. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Reny Indrianti, dkk (2020) yang memuat hasil penelitian bahwa penerapan sistem keuangan desa di Kabupaten Banjar telah menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 namun dalam penerapannya masih belum efektif dan optimal.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa Tusan dalam meningkatkan efektivitas penerapan system keuangan desa (Siskuedes) yang terjadi dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA TUSAN KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

## KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan keuangan desa yang baik didasarkan pada aturan dan prosedur yang ada. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat mencapai tujuan dan sasaran yang dapat dicapai. Siklus pengelolaan keuangan kota meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan, memperkokoh rasa kebersamaan dan memperluas infrastruktur desa. Sebelum rilis siskeudes, pemerintah menggunakan *Microsoft Excel* untuk menyimpan laporan keuangan. Hal ini mempersulit pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi anggaran desa dan laporan keuangan desa. Ada beberapa keuntungan menggunakan siskeudes, yaitu: sesuai dengan peraturan, memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, kegunaan aplikasi, serta petunjuk pelaksanaan dan panduan aplikasi. Kinerja mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017: 134). Jika organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi telah beroperasi secara efektif. Efisiensi yang dimaksud dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan kota yang harus dikelola secara terarah dan efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat.

Menurut Latrian (2018) yang mengkaji efektivitas pelaksanaan Siskeudes, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memuat hasil bahwa penerapan sistem keuangan dana desa efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa di Kabupaten Badung.

Menurut Rahmi Hayat (2021) yang mengkaji efektivitas implementasi sistem keuangan desa, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Muaraharus Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menurut hasil penelitian, penggunaan Siskeuds tergolong efektif.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi sistem keuangan desa di Desa Tusan Kecamatan Banjaranganakan Kabupaten Klungkung. Istilah kinerja mengacu pada pengukuran kemampuan individu untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa baik berasal dari desa itu sendiri maupun pemerintah baik dikelola dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Untuk penelitian ini, diharapkan model penerapan sistem keuangan desa yang efektif mampu menghasilkan efek yang baik atau mempengaruhi kelancaran pengelolaan ekonomi desa dan menyelaraskan ekonomi desa dengan menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes), yang kemudian mempengaruhi masyarakat desa. dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan, kelancaran program atau pembangunan berbasis desa.

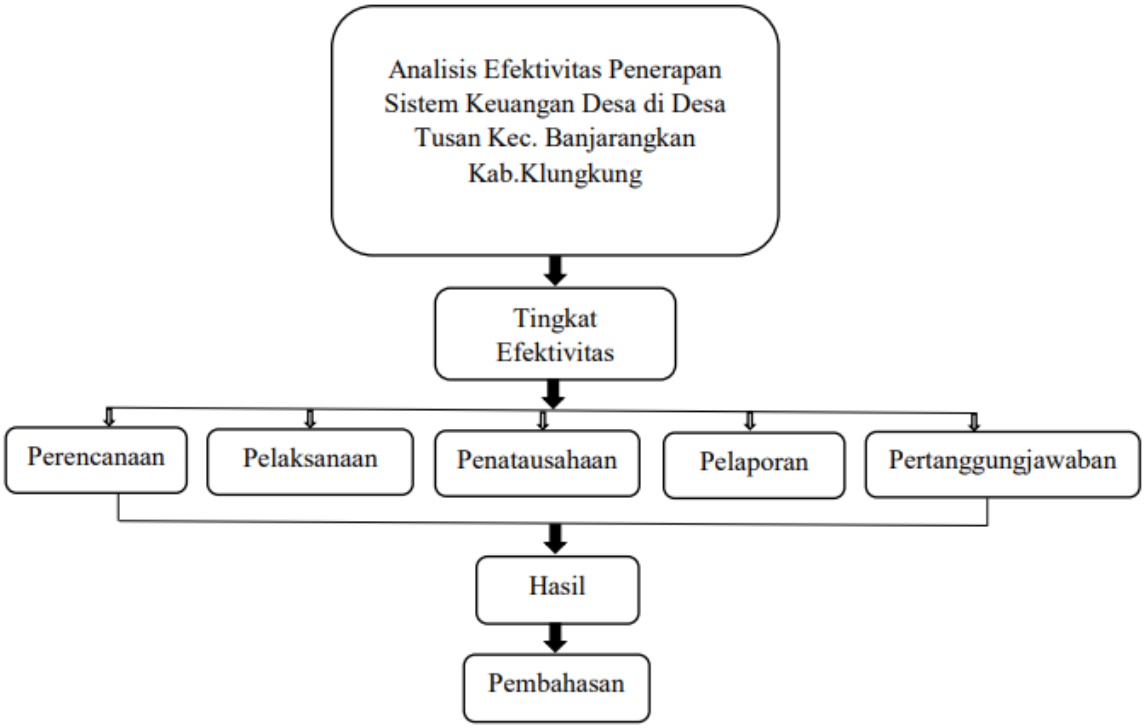


Kajian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan sistem keuangan desa yang diukur dengan beberapa metrik antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahap pertama dari proses pengelolaan keuangan desa, yaitu. perencanaan pendapatan dan belanja pemerintah desa yang dianggarkan oleh APBDesa setiap tahun anggaran. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang diproses melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh gubernur/walikota. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan APBDesa, dilakukan oleh Departemen Keuangan selaku pelaksana fungsi perbendaharaan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu dan bertujuan untuk menyajikan informasi anggaran dan keadaan keuangan pemerintahan desa. Akuntabilitas adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Negara/Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran.

Lokasi penelitian yang diambil peneliti berada di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Alasan peneliti memilih Desa Tusan sebagai lokasi penelitian karena peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa tingkat pola efektivitas penerapan Siskeudes yang ada di Desa Tusan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan di desa Tusan terkait dengan penyalahgunaan anggaran desa yang melibatkan bagian keuangan. Berdasarkan temuan aparat Desa Tusan dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan anggaran ini disebabkan adanya manipulasi laporan keuangan yang disusun secara manual. Dari segi pelaksanaan sistem keuangan desa, Desa Tusan sendiri telah melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sejak tahun 2016, namun hingga saat ini pelaksanaannya belum optimal sehingga menyebabkan kurang efisiennya pencapaian tujuan organisasi, sehingga sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya efektif.

Oleh karena itu, perangkat desa di Tusan menyeimbangkan laporan keuangan desa dengan laporan manual karena tidak semua SDM terkait memiliki pemahaman dan keahlian yang sama dalam menggunakan sistem. Manipulasi laporan keuangan tersebut menyebabkan selisih anggaran yang masuk ke sistem keuangan desa dari hasil laporan keuangan tulisan tangan. Sehingga memicu terjadinya penyalahgunaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan rencana anggaran desa.

Dalam menyikapi hal tersebut mengenai sumber daya manusia dalam tingkat pemahaman serta kompetensi sumber daya manusia untuk mengoperasikan siskeudes di Desa Tusan sendiri telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia dalam penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Tetapi dalam hal ini masih saja menjadi kendala karena sistem keuangan desa selalu mengalami perubahan versi yang membuat sumber daya manusia yang bersangkutan mengalami sedikit kesulitan.

Kemudian sesuai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur penelitian ini mengenai pengelolaan keuangan desa yakni, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, memuat hasil bahwa:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam tahap perencanaan di Desa Tusan dilakukan musyawarah terlebih dahulu mengenai perencanaan yang akan dilakukan Desa Tusan, kemudian merujuk ke RPJM dan RKP Desa, kemudian dimusyawarahkan kembali melalui musyawarah desa. Berdasarkan hasil pernyataan dari Ibu Desak Putu Eka Megawati selaku Sekretaris Desa Tusan yang menyatakan bahwa “Dalam tahap perencanaan pemerintah Desa Tusan memiliki kendala waktu dari sisiperencanaan yang mengakibatkan pemerintah Desa Tusan mengesampingkan tahap ini dalam menginput perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dan langsung masuk dalam penganggaran yang terdapat pada tahapan siskeudes. Dalam tahap ini bisa dilakukan dengan *copy paste* rencana kegiatan tahun lalu agar bisa memasukkan anggaran dalam siskeudes yang menyebabkan aparat desa Tusan sering melakukan perubahan keputusan dan penetapan secara *deadline* sesuai dengan keputusan kepala desa.”

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP Desa dan dianggarkan dalam APB Desa, dimana dalam tahap ini menjadi tahapan penginputan anggaran pada siskeudes dengan memasukkan penggunanaan anggaran kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tusan, berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel yang menyatakan “Dalam tahap pelaksanaan, Desa Tusan menginput tahap penganggaran pada siskeudes untuk pendanaan pelakasanaan kegiatan berupa dokumen rencana anggaran biaya (RAB) yang telah di validasi dan disetujui oleh kepala desa.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan rekening kas desa. Mengutip hasil wawancara dengan informan Desak Made Wartini selaku kaur keuangan sekaligus bendahara Desa Tusan bahwa "dalam tahap ini dilakukan pencatatan dari sisi pemasukan, penerimaan, dan pengeluaran yang dicatat satu tahun anggaran dan di input pada sistem dan sesuai dengan menu penatausahaan pada siskeudes kemudian dilaporkan oleh bendahara desa kepada kepala desa atau perbekel. Pada tahap ini mengenai proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dengan rekening kas desa sangat rentan karena sesuai dengan berita yang beredar kurang adanya sikap tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan sehingga dapat disalahgunakan".

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Mengutip pernyataan dari Ibu Desak Putu Eka Megawati selaku Sekretaris yang menyatakan bahwa "Tahap pelaporan terkait penyaluran dana Desa Tusan terdapat format tertentu yang diberikan oleh pemdes. Jumlah penyaluran, perencanaan, dan pelaporan dana desa terdapat beberapa pelaporannya yang bersifat manual, tetapi hanya memasukkan global anggaran-anggaran yang di danai oleh dana desa. Misalnya penyelenggaraan posyandu yang memasukkan jumlah anggaran, kemudian persentase pencapaian, tetapi tetap mengutip dari siskeudes"

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Dari sisi pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa tusan menurut para informan sebenarnya sudah bersifat *akuntabel*, karena dalam tahap ini diinput dengan siskeudes melalui hasil kompilasi APB Desa yang merupakan ikhtisar APB Desa dalam satu tahun anggaran. Tetapi karena pelaporan keuangan yang dilakukan diimbangi dengan pelaporan yang dikerjakan dengan manual tulis tangan dan *Microsoft Excel* menyebabkan adanya *human eror* seperti manipulasi data keuangan yang mudah dilakukan, yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan anggaran desa.

Resume/simpulan Indikator Efektivitas Sistem Keuangan Desa Di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

**Tabel 1. Resume Indikator Analisis Penelitian**

| Indikator | Keterangan |
|---|---|
| Perencanaan | Tidak efektif |
| Pelaksanaan | Efektif |
| Penatausahaan | Efektif |
| Pelaporan | Tidak efektif |
| Pertanggungjawaban | Efektif |

Dilihat dari tujuan kebijakan siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP yaitu dalam mendorong pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari tingkat efektivitas penerapan siskeudes yang diharapkan Pemerintah. Mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa siskeudes dianggap *mandatory* serta diberlakukan untuk seluruh desa dalam penerapannya, mengingat sistem aplikasi ini dikembangkan BPKP dalam mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan agar dapat meminimalisir manipulasi keuangan desa.

Efektivitas dalam suatu penerapan merupakan proses dimana penerapan atau implementasi diterapkan dan dilaksanakan dengan jelas dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai akuntabilitas melalui penerapan siskeudes. Sehingga hal yang menjadi tujuan dari pengelolaan keuangan desa mampu direalisasikan dengan tepat sasaran serta tujuan desa, yang menjadikan sebuah sistem dikatakan efektif karena adanya pengimplementasian serta penerapan yang benar.

Kondisi yang ideal pada tahap perencanaan adalah dimana dalam tahap perencanaan ini penting dilakukan karena merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan desa. Mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 bahwa dalam perencanaan keuangan desa yang merupakan kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu di masa yang akan datang, dan dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa menjadi pokok pembuatan APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Tusan dalam melakukan tahap perencanaan dikategorikan tidak ideal dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang dimana dengan alasan terkendala waktu yang menjadikan pemerintah desa Tusan melewati tahap ini sebagai rencana awal realisasi anggaran desa dan merujuk langsung pada tahap penganggaran saja. Jika dilihat dari kondisi yang ideal terjadi pada tahap ini yaitu terdapat proses *entri* data dan penyusunana perencanaan jangka menengah (RPJMDesa) dan perencanaan tahunan (RKPDesa) sebagai langkah awal pada tahap perencanaan yang mampu merancang penyusunan APBDesa

dengan pola yang baik dan benar serta sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan di Desa Tusan sudah dikategorikan ideal dalam pengerjaannya, karena dalam tahap ini sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada aplikasi siskeudes serta sudah diterapkan baik oleh aparat desa Tusan. Begitu pula pada tahap penatausahaan, di desa Tusan sudah melakukan tahap ini dengan prosedur siskeudes yang meliputi penatausahaan penerimaan yang terdiri dari penerimaan tunai dari masyarakat atas pendapatan asli desa dan penerimaan desa yang melaui bank yang diterima tunai oleh kaur keuangan.

Dalam hasil wawancara disampaikan bahwa pada tahap ini sangat rentan karena kurang adanya sikap tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan sehingga dapat disalahgunakan. Karena jika dilihat dari kondisi yang ideal terjadi pada tahapan ini bahwa penerimaan tunai yang diterima kaur keuangan desa harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas desa.

Kemudian dalam tahap pelaporan yang dilakukan di Desa Tusan menggunakan format manual yang menunjukkan kondisi tidak ideal dalam penyusunan pelaporan keuangan desa yang telah dilakukan. Jika dilihat dari kondisi yang ideal terjadi pada tahap ini sebenarnya tahap pelaporan yang ada di siskeudes telah terhubung dari setiap tahapan penginputan yang terdapat pada sistem, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan penggunaan dana desa, hingga laporan penyerapan dana desa. Dan dengan ini seharusnya aparat desa lebih mudah untuk melakukan pelaporan tanpa menggunakan format manual yang dapat menjadi pemicu manipulasi pelaporan keuangan desa yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan APB Desa.

Pada tahap akhir pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Tusan sudah dilakukan sesuai prosedur siskeudes, meskipun dalam hal ini secara menyeluruh terdapat beberapa tahapan yang belum sesuai dengan siskeudes tetapi ditahap pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan siskeudes mulai dari kompilasi data anggaran, ekspor impor data APB Desa sampai tahap cetak laporan hasil kompilasi data.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian disimpulkan bahwa:

1. Desa Tusan dapat dikategorikan belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang berkaitan dengan penerapan siskeudes yang diberlakukan kepada seluruh desa.
2. Dari sisi penerapan Siskeudes di Desa Tusan dikatakan belum berjalan efektif serta optimal dari sisi penerapannya, karena di Desa Tusan belum sepenuhnya menerapkan sistem tersebut dan masih diimbangi dengan pelaporan manual yang di tulis tangan maupun Microsoft Excel mengingat sumber daya manusia yang bersangkutan kurang adanya kompetensi serta pemahaman dalam mengoperasikan sistem tersebut.

3. Lemahnya kemampuan perencanaan yang dilakukan di Desa Tusan menyebabkan hasil penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan desa menjadi tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan.
4. Tahap penginputan laporan keuangan yang dilakukan tidak menunjukkan kondisi yang ideal karena dalam tahap ini Pemdes Tusan masih membuat tahap pelaporan dengan format manual yang dapat memicu adanya manipulasi laporan keuangan sehingga menyebabkan adanya penyalahgunaan anggaran.

Saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah Desa Tusan diharapkan untuk lebih sering memberikan sosialisasi serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparat desa Tusan terkait penerapan serta penggunaan siskeudes agar tahapan dalam pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
2. Diharapkan aplikasi siskeudes dapat diterapkan dengan optimal mengingat dalam aturan yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 mengenai siskeudes yang dianggap *mandatory* untuk diterapkan guna meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan desa. Dengan demikian agar tidak lagi menggunakan format manual dalam membuat laporan keuangan desa yang mampu menjadi pemicu manipulasi laporan keuangan dan menyebabkan timbulnya penyalahgunaan anggaran.
3. Pemerintah Desa Tusan diharapkan mampu meningkatkan komitmen organisasi karena merupakan faktor penting dalam mengelola keuangan desa. Karena dengan adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan desa sehingga mampu melaksanakan program dengan baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang sejenis dengan penelitian ini agar dapat dianalisis dengan lebih sempurna.

## Daftar Pustaka

A.Arianto, Ashabul Kahp. 2020. *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Chairul Iksan Burhanuddin , Syamsuddin , Maryam Nurdin , Fifi Nur Afifah Ibrahim, Rismayant. 2022. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa.* Universitas Muhammadiyah Makassar, IBK Nitro, Universitas Muslim Indonesia: Owner: Riset & Jurnal Akuntansi

Farida Kurnianingrum, Shandra, Arya Bimasena, Devika Ananda, Faris Adi, Reza Faluvi. 2021. *Petunjuk Teknis Oprasional Penatausahaan Keuangan Desa.* Ditjen Bina Pemerintah Desa : Kementerian Dalam Negeri RI

Hamid , Darmadi. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Hijratul Aeni, Dkk. 2022. *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari).* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram. Jambi.

Kementerian Dalam Negeri. 2018. SISKEUDES Sistem Keuangan Desa Manual Operasi Aplikasi Siskeudes. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa: Jakarta Selatan.

Kurnianingrum, Bimasena, Ananda, Dkk. 2021. Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta Selatan.

Kurnianingrum, Bimasena, Ananda, Dkk. 2021. Petunjuk Teknis Perencanaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta Selatan.

Mardiasmo.(2017). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.

Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mutiara Mardaw, M. Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar. 2022. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang: Universitas Islam Malang

Rahmi Hayati. 2021. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong*. Program Studi Administrasi Publik: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Kalimantan Selatan.

Reny Indrianti, Dkk. 2020. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Islam. Kalimantan

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono.(2010). *MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung :Alfabeta

Sundari Maheni Premasuwari, Ni Putu., Suartana, I Putu. 2021. *Kecanggihan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana : Universitas Udayana, Bali.

Yenni Latrini, Made. 2018. *Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana : Universitas Udayana, Bali.